

PENGUATAN UKM MENGHADAPI MEA MELALUI SUMBER ENERGI ALTERNATIF

Amalia Ilmiani, Catur Ragil Sutrisno

Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan

Email: am3lhardjo@gmail.com / caturunikal@gmail.com

Abstrak

Perekonomian global yang mengedepankan nilai daya saing, kualitas produk dan efisiensi semakin menegaskan perlunya penerapan prinsip demokrasi ekonomi tersebut dalam suatu perundang-undangan yang memihak pada UKM. Tantangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) semakin kompleks. Salah satu diantaranya kebijakan pemerintah tentang pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Subsidi BBM yang dihapus akan mengurangi defisit anggaran pemerintah namun disisi lain mengakibatkan berbagai harga kebutuhan pokok akan mengalami kenaikan serta tarif dasar listrik yang meningkat. Semakin menipisnya persediaan BBM, masyarakat mulai beralih memanfaatkan sumber energi berupa gas. Gas yang sudah menjadi kebutuhan pokok energi secara nasional, pemerintah seharusnya mensubsidi sumber energi tersebut tetapi juga mengalami kenaikan harga. Meningkatnya biaya-biaya tersebut dapat mengurangi jumlah laba pengusaha, bagaimana pengusaha dapat bersaing dengan semakin banyaknya barang impor?. Harapan pemilik UKM, pemerintah mulai memikirkan sumber energi lain yang dapat dijangkau, misalnya energi nuklir, energi panas bumi, atau sumber energi terbarukan (energi Bahan Bakar Nabati/BBN seperti biofuel).

Kata kunci : UKM, MEA, subsidi, energi alternatif

Abstract

Global economy that puts the value of competitiveness, product quality and efficiency increasingly emphasized the need for the application of the principle of economic democracy in the legislation in favor of SMEs. Challenges of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia in the face of increasingly complex ASEAN Economic Community (AEC/MEA). One of these government policy on subsidy removal fuel oil (BBM). Removed fuel subsidies would reduce the government's budget deficit, but on the other hand lead to a variety of staple goods prices will rise as well as basic electricity price increases. The depletion of supplies of fuel, people are starting to switch harness energy sources such as gas. Gas that has become a staple of national energy, the government should subsidize the energy source but also experienced price increases. Rising costs may reduce the number of returns to owners, how entrepreneurs can compete with the increasing number of imported goods ?. Hope the owners of SMEs, the government began to think of other energy sources that can be reached, for example, nuclear energy, geothermal energy, or renewable energy sources (energy Biofuels / BBN as biofuel).

Keywords: SME, AEC, subsidies, alternative energy

PENDAHULUAN

ASEAN merupakan kekuatan ekonomi ketiga terbesar setelah Jepang dan Tiongkok, dimana terdiri dari 10 Negara di Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terbentuk karena adanya kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Modal asing dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN. Tujuan

dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah untuk meningkatkan stabilitas perekonomian dikawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN.

Ada beberapa dampak dari berlakunya MEA, yakni dampak aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. Tidak hanya dampak, ada beberapa hambatan Indonesia untuk menghadapi MEA. Hambatan tersebut yaitu masih redahnya mutu pendidikan tenaga kerja Indonesia, kurangnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur, ketergantungan impor bahan baku dan setengah jadi karena sektor industri yang masih rapuh, dan keterbatasan pasokan energi (National Geographic, 2011).

PEMBAHASAN

Penghapusan subsidi BBM terhadap UKM

Pembatasan dan penghapusan BBM subsidi mulai diterapkan pada saat ini. Hal ini menjadi tantangan, sekaligus menjadi hambatan yang bisa memengaruhi kinerja dunia usaha, khususnya sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Pembatasan BBM yang dicanangkan oleh pemerintah dinilai sangat merugikan masyarakat. Pasalnya, setiap pembatasan kebutuhan energi masyarakat akan mengurangi kegiatan ekonomi sehingga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dampak pembatasan BBM kepada sektor perdagangan adalah naiknya barang-barang pokok yang menyebabkan inflasi dan membuat harga BBM semakin meningkat. Akibatnya timbul dampak berantai dari keputusan semacam ini terhadap rakyat miskin, kaum buruh, petani, ataupun para usahawan bermodal kecil atas setiap kenaikan harga.

Kebudayaan BBM bersubsidi dipersoalkan karena dianggap sebagai bentuk pemborosan anggaran negara yang dalam pandangan pemerintah sewajarnya dihapuskan. Ini menggambarkan kedaulatan penguasaan dan pemasaran energi sebagai salah satu dasar terpenting bagi kemajuan perekonomian rakyat sedang kembali hadir untuk disikapi bersama. BBM memang hanya salah satu jenis energi, namun jenis ini masih banyak digunakan baik untuk industri maupun kegiatan transportasi. Kebijakan pemerintah hanya fokus pada pembatasan BBM bersubsidi dengan alasan penghematan APBN, namun tidak tampak usaha yang serius dari pemerintah untuk membatasi pengeluaran anggaran negara berkaitan dengan pembayaran utang luar negeri, atau menghemat pengeluaran belanja para pejabat di Kementerian/Lembaga (Shelly, 2011).

Penghapusan subsidi BBM yang dilakukan oleh pemerintah di satu sisi akan mengurangi beban pengeluaran pemerintah dalam anggaran dan beban subsidi dapat dialokasikan untuk kepentingan yang lain, namun di sisi lain kebijakan tersebut mengharuskan pemerintah untuk menaikkan harga jual BBM. Kenaikan harga BBM akan menaikkan tarif jasa angkutan sehingga mendorong kenaikan biaya produksi (*cost-push*) di sektor industri seperti Tarif Dasar Listrik (TDL) dan akibatnya terjadi kenaikan harga barang dan jasa lainnya (Susilo, 2013). Peningkatan biaya tersebut selain mengakibatkan pengeluaran UKM lebih membengkak, dikhawatirkan produk UKM akan lebih mahal dibandingkan barang-barang impor. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan suatu sektor dalam perekonomian tidak terlepas dari sektor lainnya, sehingga kebijakan yang berkaitan langsung dengan sektor tersebut akan berimbas pada perekonomian secara makro.

Namun, ada beberapa argumentasi yang setuju terhadap penghapusan subsidi BBM. Argumen Dartanto (2005) dan Hasyim (2005) dalam Susilo (2013) diantaranya:

- Perbedaan harga jual domestik dengan harga luar negeri yang timpang sehingga mendorong penyelundupan BBM ke luar negeri.
- Harga domestik yang rendah, cenderung mendorong pertumbuhan tingkat konsumsi yang sangat tinggi. Di sisi lain, produksi minyak mentah Indonesia terus mengalami penurunan.
- Dapat mengurangi tingkat polusi dan mendorong penggunaan energi alternatif.
- Harga BBM yang relatif murah akan mendorong konsumsi yang berlebihan (*over consumption*).

Sumber Energi Alternatif

Sumber energi selain BBM yang juga banyak dikonsumsi rakyat Indonesia adalah energi gas. Sumber energi gas telah mengambil alih peran sebagai sumber energi utama di Indonesia. Gas yang menjadi kebutuhan pokok energi secara nasional yang melebihi minyak bumi, terutama tabung 3 kg

yang menjadi kebutuhan pokok rakyat kecil, harganya semakin meningkat dan pemerintah tidak memberikan subsidi.

Sumber energi minyak bumi semakin menipis dengan semakin sedikit sumur-sumur cadangan minyak baru, namun ladang gas baru justru jumlahnya semakin banyak. Selain itu ada energi panas bumi di gunung yang bisa dieksplorasi, energi batubara, energi nuklir yang belum dimaksimalkan oleh PLTN (Halim, 2014). Panas Bumi merupakan sumber energi yang sedang ramai diperbincangkan saat ini, karena kelebihanannya antara lain lebih murah, mudah, dan bersih. Panas bumi diharapkan akan menjadi sumber energi utama di masa depan. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki sekitar 40% potensi panas bumi dunia (Samudra, 2014).

Selain itu, sumber energi alternatif juga mampu dihasilkan dari proses pemanfaatan limbah, seperti limbah industri tahu dan limbah kotoran ternak sapi. Industri tahu di Desa Kalisari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas salah satu contohnya. Banyaknya industri tahu di daerah tersebut mengakibatkan limbah yang dihasilkan juga banyak. Hasil pengolahan limbah tahu melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) secara kolektif mampu menghasilkan energi dalam bentuk biogas limbah tahu (biolita) yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak dan telah dimanfaatkan oleh sekiraat 212 kepala keluarga. Manfaat lain dari pengolahan limbah tahu melalui IPAL adalah teratasinya permasalahan lingkungan berupa pencemaran sungai, pencemaran udara karena menimbulkan bau tak sedap dan gas berbahaya.

Secara umum, sumber energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan sumber energi yang berbasis fosil (*fossil fuel*). Oleh karena itu, pemerintah baik pusat maupun daerah sebaiknya mulai mengembangkan Bahan Bakar Nabati (BBN)/*Biofuel* secara lebih serius.

Sumber Energi Alternatif dan Penguatan UKM

Pencabutan subsidi BBM telah dirasakan dampaknya oleh pelaku usaha, khususnya UKM. Kenaikan harga akibat kenaikan BBM yang dicabut subsidiya menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang, termasuk bahan baku industri. Bertambahnya biaya bahan baku mengakibatkan harga produk jadi meningkat sehingga harga jualnya juga mengalami kenaikan. Jika harga jual tetap dipertahankan pada harga sebelum ada kenaikan bahan baku, maka produsen akan mengalami kerugian. Atau produsen dapat mempertahankan harga, tetapi kualitas diturunkan untuk menekan biaya produksi sehingga kerugian dapat dihindarkan.

Menaikkan harga maupun menurunkan kualitas merupakan pilihan yang sama-sama berisiko, apalagi jika dikaitkan dengan persaingan dengan produk-produk luar yang membanjiri pasar dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah strategis untuk melindungi produsen dalam negeri, terlebih UKM, supaya *sustainable* dan mampu bersaing dengan produsen dari negara lain. Produk dalam negeri tidak tergilas dan terpinggirkan di negeri sendiri.

Pemilihan dan pengembangan energi alternatif sebagai pengganti BBM bersubsidi menjadi pilihan tepat yang dapat ditempuh pemerintah dalam rangka menyiapkan sumber energi murah yang dapat dijangkau semua lapisan masyarakat. Dengan hal ini, paling tidak harga bahan baku tidak mengalami kenaikan tinggi sehingga produsen dapat tetap berproduksi tanpa harus menaikkan harga atau menurunkan kualitas produknya. Sehingga daya saing pelaku usaha dalam negeri dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan, terlebih menghadapi persaingan pasar terbuka.

PENUTUP

Dalam upaya menghadapi semakin banyak produk-produk impor, diharapkan pemerintah membuat kebijakan yang dapat menekan biaya produksi UKM, misalnya dengan memberikan subsidi energi gas. Di sisi lain, dengan dihapusnya subsidi BBM, diharapkan dana subsidi dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang lebih baik dan bantuan langsung kepada rakyat kecil. Sebagian lagi dana subsidi tersebut dalam dialokasikan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan yang terbuat dari nabati (*biofuel*), dan juga mengembangkan energi panas bumi.

REFERENSI

- Berita. 2013. Teknologi Biogas untuk Pengembangan Desa Mandiri Energi. www.bppt.go.id. Diakses tanggal 20 Januari 2015.
- Halim, Abdul. 2014. Jokowi dan Pencabutan Subsidi BBM. www.voa-islam.com. Diakses tanggal 20 Januari 2015.
- Shelly Iszvetya Supit. 2011. Pembatasan BBM dan Pengaruh Pada Sektor Perdagangan. Blogspot diakses tanggal 20 Januari 2015.
- Samudra, Hero. 2014. Masa Depan Ekonomi Indonesia. Prakasa Intermedia.
- Susilo, Y. Sri. 2013. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia. Gosyen Publishing.
- Website National Geographic.com. diakses tanggal 20 Januari 2015.